

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota pemekaran di Sumatera Barat memiliki kriteria rendah sekali atau dapat dikategorikan kedalam pola instruktif, dimana peran dari pemerintah pusat dalam pembiayaan pelaksanaan program pemerintah daerah lebih dominan daripada pemerintah daerah itu sendiri. Karena memiliki nilai dari rasio kemandirian keuangan daerah yang lebih kecil dari 25%. Hal ini berarti masih rendahnya kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pemerintahannya sendiri atau masih tingginya ketergantungan terhadap pihak luar.
2. Rasio derajat desentralisasi fiskal kabupaten/kota pemekaran di Sumatera Barat selama periode 2010-2021 memiliki rata-rata kurang dari 10% atau hanya mencapai sebesar 6,93 %. Hal tersebut menunjukkan derajat desentralisasi fiskal kabupaten/kota pemekaran di Sumatera Barat sangat kurang sehingga belum mampu mengelola keuangannya untuk membiayai program-program untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Rasio efektivitas PAD kabupaten/kota pemekaran di Sumatera Barat selama periode 2010-2021 memiliki rata-rata sebesar 89,40 %, sehingga

efektivitas pengelolaan PAD yang dimiliki Sumatera Barat selama periode 2010-2021 masih kurang efektif.

4. Rasio efektivitas pajak daerah kabupaten/kota pemekaran di Sumatera Barat selama periode 2010-2021 memiliki rata-rata sebesar 83,02, artinya efektivitas penerimaan pajak sudah berada pada kategori cukup efektif, namun hal tersebut belum mampu menunjang penerimaan PAD di kabupaten/kota pemekaran di Sumatera Barat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan penelitian, maka terdapat beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Bagi pemerintah daerah pemekaran di Sumatera Barat agar lebih mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang ada dan berupaya untuk meningkatkan penerimaan PAD dengan memanfaatkan potensi daerah yang belum tergali.
2. Bagi peneliti berikutnya memperluas sampel penelitian karena penelitian ini hanya melihat bagaimana kinerja dari pemerintah daerah pemekaran yang ada di Sumatera barat sehingga hasil penelitian dapat menunjukkan data yang lebih signifikan.
3. Peneliti selanjutnya juga dapat melihat bagaimana kinerja belanja pemerintah dalam bidang pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak karena IPM dipengaruhi oleh dua bidang belanja tersebut.
4. Oleh karena itu masih terdapat faktor atau variabel independen lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini seperti rasio efisiensi PAD,

rasio efisiensi pajak daerah, rasio pertumbuhan ekonomi dan rasio keserasian belanja daerah

